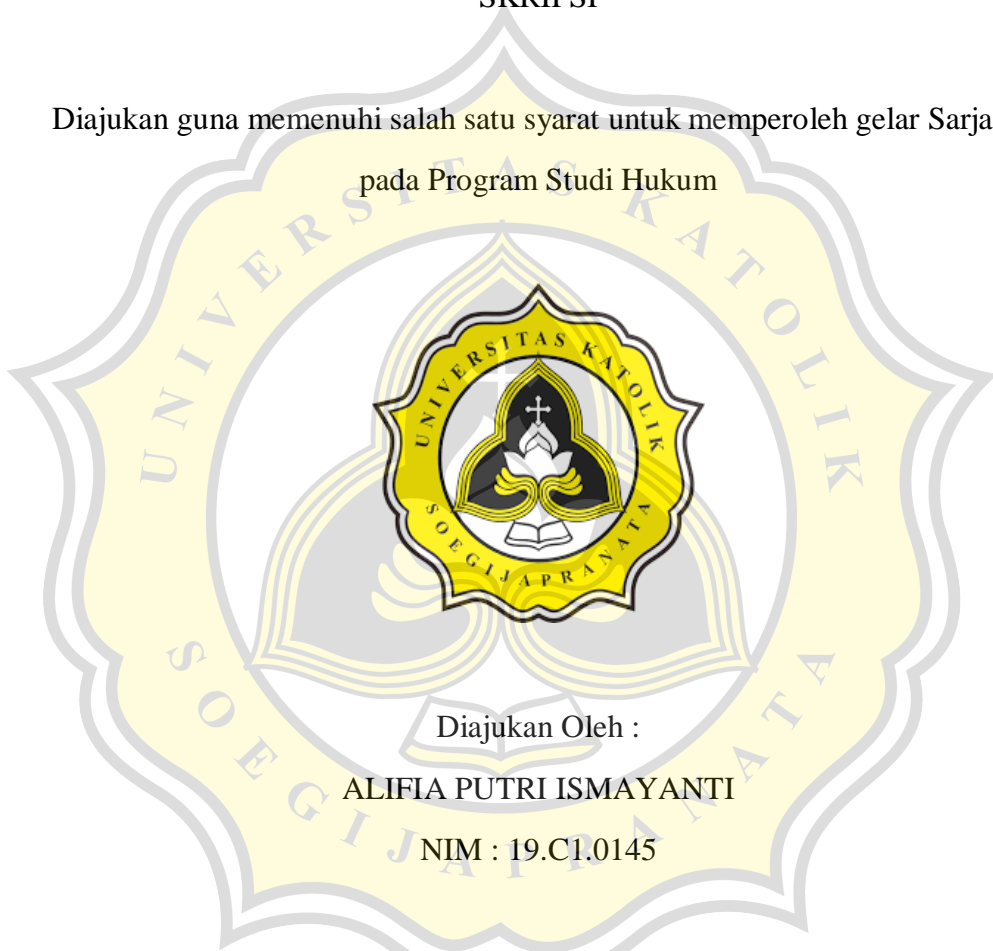


**PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS I KOTA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
pada Program Studi Hukum



Diajukan Oleh :

**ALIFIA PUTRI ISMAYANTI**

**NIM : 19.C1.0145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi, yang mana banyak seseorang melakukan tindak pidana sehingga mereka harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Penyandang Disabilitas. Seseorang yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang perlu mendapatkan upaya perlindungan berbasis Hak Asasi Manusia, upaya tersebut berupa bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas kebijakan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dari hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jateng, Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian antara lain (1) Upaya perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Tuna Daksa. (2) Hambatan dalam upaya perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, yakni Hambatan Internal dan Eksternal. Hambatan internal yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh Petugas untuk memberikan pelayanan, sarana dan prasarana yang dimiliki, sedangkan hambatan eksternal yakni kurangnya pengawasan dari Pemerintah sehingga masih ada fasilitas belum terpenuhi, dan anggaran yang kurang maksimal sehingga pembangunan belum dilakukan secara optimal untuk menunjang para Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas.

Saran untuk Pemerintah agar lebih memperhatikan pengawasan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang yang mana fasilitas sarana dan prasarana bagi para warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi. Adapun saran lain seperti lebih rutin mengadakan program pelatihan Bahasa Isyarat bagi para Petugas agar mempermudah proses berkomunikasi dengan para Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas terutama tuna wicara dan tuna rungu.

**Kata Kunci : Warga Binaan Pemasyarakatan, Penyandang Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia**